



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 20 /II.01/HK/2013**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI
LAMPUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna maka perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2013, agar menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Kerja dimaksud kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2013 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013, Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif dengan Kode Rekening 1.20.06.20.07.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15/1/2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; ✓
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2013												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
I	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DPRD													A. Itjen Kem DAGRI
														B. Itjen Kem ESDM
	1. Biro Tata Pemerintahan Umum						A				X2.2		A2	C. Itjen Kem Perindustrian
	2. Biro Otonomi Daerah									X3.2				D. Itjen Kem Pertanian
	3. Biro Hukum						A					X3.2		E. Itjen Kem Kehutanan
	4. Biro Perekonomian							X4.1						F. Itjen K.K.P
	5. Biro Administrasi Pembangunan									X2.1				G. Itjen Kem Perhubungan
	6. Biro Bina Sosial											X2.3		H. Itjen Kem P U
	7. Biro Pemberdayaan Perempuan											X4.3		I. Itjen Kem Kesehatan
	8. Biro Umum			X2.2			A						X2.2	J. Itjen Kem DIKBUD
	9. Biro Keuangan		XR		X4.2		A				X4.2		(A2)	K. Itjen Kem NAKERTRANS
	10. Biro Perlengkapan dan Aset			X3.1			A				X3.1			L. Itjen Kem Sosial
	11. Biro Organisasi											X1.2		M. Itjen Kem Perdagangan
	12. Sekretariat DPRD		X2.2				A					X2.2		N. Itjen Kem KOMINFO
II	INSPEKTORAT, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS													O. Inspektorat Meneg PORA
	1. Inspektorat Provinsi						A							P. Inspektorat Meneg Koperasi
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)			X2.1			A					X2.1	A2	X. Inspektorat Provinsi
	3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah		X1.2				A				X1.2		A2	Y. BPKP
	4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)			X3.3						X3.3				
	5. Badan Ketahanan Pangan Daerah				D	X1.1					D	X1.1		
	6. Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah				X2.3						X2.3			
	7. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah						X4.2						X4.2	
	8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa			X1.3			A					X1.3	(A2)	
	9. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)			X3.2			A				X3.2			
	10. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah					X4.2	A					X4.2	(A2)	
	11. Satuan Polisi Pamong Praja				X2.2						X2.2			
	12. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdoel Moeloek					X3.3						X3.3		
	13. Rumah Sakit Jiwa Daerah		X1.3						X1.3					
	14. Kantor Sandi Daerah								X1.2					

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2013												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
III	DINAS - DINAS													A. Pemeriksaan Reguler 1. E-KTP uji petik ke 1 Kab/ Kota dan 2 Kecamatan terdekat 2. Pemb Daerah dan Tata Ruang uji petik pada Dinas PU (yang terkait Tata Ruang) 3. PTSP uji petik pada..... 4. Daerah tertinggal, terdepan dan Pasca Konflik uji petik pada..... 5. Mempertahankan WTP uji petik pada..... A2. Rik Dana Dekon/TP (termasuk dari Adminduk) Tahun 2012 oleh Itjen Kementerian DAGRI XR. Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Provinsi Catatan : BPKP dapat melakukan Pengawasan setelah ada Kesepakatan dengan Itjen Kementerian / LPNK terkait
	1. Dinas Pendidikan					X4.3	A				J		X4.3	
	2. Dinas Pemuda dan Olah Raga	O			X3.3						X3.3			
	3. Dinas Kesehatan	I					X3.3	I					X3.3	
	4. Dinas Sosial						X2.3		L				(X2.3) (A2)	
	5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				X1.3		K			X1.3			(A2)	
	6. Dinas Perhubungan			X1.2						X1.2			G	
	7. Dinas Komunikasi dan Informatika			X4.2						X4.2				
	8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				X2.1								X2.1	
	9. Dinas Bina Marga		X2.1				A			H	X2.1			
	10. Dinas Pengairan dan Permukiman						X4.1			H		X4.1		
	11. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindag			P		(C) X3.1	N					X3.1		
	12. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura				D			X1.1		D			X1.1	
	13. Dinas Perkebunan				D	X4.1				D (X4.1)				
	14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				D		X1.1			D		X1.1		
	15. Dinas Kelautan dan Perikanan						X3.1			F			X3.1	
	16. Dinas Kehutanan					X4.1						E	X4.1	
	17. Dinas Pertambangan dan Energi	X2.2							X2.2		B			
	18. Dinas Pendapatan		XR		X3.2		A						X3.2	
IV	BUMD													XR. Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Provinsi
	PD. Wahana Raharja				X3.1									
V	LEMBAGA LAIN													Catatan : BPKP dapat melakukan Pengawasan setelah ada Kesepakatan dengan Itjen Kementerian / LPNK terkait
	1. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah												X1.3	
	2. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri						X4.3							
	3. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana			X2.3						X2.3				
	4. Sekrt Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan				D	X1.1				X1.1	D			
	5. Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta					X1.2							X1.2	
VI	UPTD - UPTD DINAS													
	1. UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura													
	a. UPTD Balai Pengawasan &Sertifikasi/BenihTanamanPangan&Holtikultura			X1.1										
	b. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura								X1.1					
	c. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Holtikultura		X1.1											
	d. UPTD Balai Pengembangan Ihn Kering dan Alat mesin Pertanian							X1.2						
	e. UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan				X1.2									
	f. UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian						X1.2							
	g. UPT Pertanian Pusat				D						D			

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2013											
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
VI	UPTD - UPTD DINAS												
	2. UPTD Dinas Bina Marga												
	a. UPTD Balai Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	X2.1											
	b. UPTD Balai Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	X2.1											
	c. UPTD Balai Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III						X2.1						
	d. UPTD Balai Pengujian /Laboratorium							X2.1					
	3. UPTD Pengairan dan Permukiman												
	a. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I			X4.3									
	b. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II							X4.1					
	c. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III									X4.1			
	d. UPTD Balai Informasi Pengembangan Pemukiman dan Bangunan						X4.1						
	4. UPTD Dinas Pendapatan												
	a. UPTD Pajak Daerah Prov Lampung Wilayah I	X3.2											
	b. UPTD Pajak Daerah Prov Lampung Wilayah II						X3.2						
	c. UPTD Pajak Daerah Prov Lampung Wilayah III							X3.2					
	d. UPTD Pajak Daerah Prov Lampung Wilayah IV								X3.2				
	e. UPTD Pajak Daerah Prov Lampung Wilayah V			X3.2									
	5. UPTD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindag												
	a. UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi UMKM								X3.1				
	b. UPTD Perkuatan Modal Koperasi UMKM								X3.1				
	c. UPTD Balai Kemetrologian		X3.1										
	d. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang		X3.1										
	e. UPTD Balai Industri Logam Keramik dan Bahan-Bahan Bangunan					X3.1							
	6. UPTD Dinas Perkebunan												
	a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan							X4.2					
	b. UPTD Balai Pengawasan, Pengujian Mutu Benih dan Kebun Induk	X4.1											
	c. UPTD Balai Beni dan Kebun Induk		X4.1										
	7. UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan												
	a. UPTD Balai Inseminasi Buatan	X1.1											
	b. UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Pakan	X1.1											
	8. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan												
	a. UPTD LPPMHP	X3.1											
	b. UPTD Balai Budidaya Ikan				X3.1								
	c. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat							X3.1					
	d. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Timur								X3.1				
	9. UPTD Dinas Kesehatan												
	a. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan						X3.3						
	b. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan							X3.3					
	10. UPTD Dinas Kehutanan												
	a. UPTD Taman Hutan Raya Wab Abdul Rahman								X4.1				
	b. UPTD Inventarisasi Pemetaan Hutan				X4.3								
	c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegei	X4.3											
	d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani		X4.3										
	e. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Muara Dua			X4.3									

X. Inspektorat Provinsi
X1. Irbanwil I
X2. Irbanwil II
X3. Irbanwil III
X4. Irbanwil IV

1. Seksi Pembangunan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Kemasyarakatan

VII	KABUPATEN / KOTA	JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2013												Keterangan
		Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Kota Bandar Lampung						X3.123							
2	Kota Metro						X4.123							
3	Kabupaten Lampung Selatan								X4.123					
4	Kabupaten Lampung Timur									X2.123				
5	Kabupaten Lampung Tengah					X1.123								
6	Kabupaten Lampung Utara						X1.123							
7	Kabupaten Mesuji				X1.123									
8	Kabupaten Lampung Barat				X3.123									
8	Kabupaten Tanggamus		X2.123											
10	Kabupaten Pringsewu							X4.123						
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat								X3.123					
12	Kabupaten Tulang Bawang						X2.123							
13	Kabupaten Pesawaran					X3.123								
14	Kabupaten Way Kanan									X4.123				

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.